



Pokja Polhukam

Rapat Koordinasi 6 Anggota BPP se papua dengan ASDEP Letjen TNI HERI WIRANTO dan staf Kedeputan I yang mengurus keamanan dalam negri sekali gus membawahi papua terutama dalam pengawasan Otsus

Jakarta, 04/09/2025



Usulan untuk pelaksanaan pleno Anggota BPP dengan wapres begitu juga dengan presiden sekaligus pengenalan anggota BPP

setiap kali kegiatan tentang Otsus Papua akan melibatkan BPP

Akan membantu BPP untuk berkoordinasi dengan kementerian lain yg terkait dengan Otsus Papua

usulan utk pola pelibatan satgas dalam mengatasi Konflik agar mengutamakan Humanis seperti membantu rayat di bidang ekonomi ,kesehatan dan pendidikan

mengusulkan penggantian sekretaris eksekutif yg di jakarta agar birokrasi perijinan dalam lakgas (tupoksi) BPP lebih cepat dan kalau bisa sekretaris eksekutif itu berkantor di papua

Adanya koordinasi serta kerjasama dalam awaki tata kelola dana otsus



Maksud dan tujuan rapat

Rapat pembahasan kerja sama antara Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan Gubernur bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua. Rapat ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu penting dan merumuskan langkah-langkah strategis



Rapat ini diadakan untuk membahas tindak lanjut pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, penyelesaian masalah beasiswa Siswa Unggul Papua, dan keberlanjutan pembangunan Papua. Selain itu, rapat juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus, serta perlunya perubahan pendekatan dalam pelaksanaan program-program agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat



Nabire, 10/09/2025



Dinas PUPR, BP3OKP Papua Tengah dan Dinas Pendidikan Papua Tengah melakukan survei mata air yang rencana akan ditarik ke SMA UNGGULAN MEEPAGO yang rencananya, kewenangan pengelolaan akan ditarik ke Provinsi tahun 2026 untuk menyiapkan anak2 terbaik OAP utk berdaya saing merebut berbagai peluang beasiswa dan daya saing kerja dalam dan luar negeri. Nabire 12 September 2025. (ykuayo).

12/09/2025

Isu-isu anak putus sekolah

FAKTOR PENYEBAB ANAK PUTUS SEKOLAH



- ingkat anak putus sekolah pada tahun 2025 bervariasi di berbagai jenjang pendidikan. Data dari Kabupaten Bogor tahun ajaran 2024-2025 menunjukkan jumlah anak putus sekolah tertinggi berada di tingkat Sekolah Dasar (SD).
- **Data Putus Sekolah Berdasarkan Tingkat**
- **Sekolah Dasar (SD):**
 - Tingkat 1: 324 anak
 - Tingkat 2: 52 anak
 - Tingkat 3: 26 anak
 - Tingkat 4: 31 anak
 - Tingkat 5: 70 anak
 - Tingkat 6: 29 anak
 - Total: 533 anak
- **Faktor-faktor Penyebab Putus Sekolah**
- Beberapa faktor yang mendorong anak putus sekolah antara lain kondisi ekonomi, perhatian orang tua, fasilitas pembelajaran, minat anak untuk sekolah, budaya, dan lokasi sekolah

Anggota BPP, Pokja papua cerdas, pokja papua sehat, pokja papua produktif dan polhukam



Anggota BPP melakukan rapat kerja bersama 4 pokja mendiskusikan rencana strategis BP3OKP Papua Tengah di bidang pendidikan, kesehatan, produktif, dan keamanan terbatas dalam pembangunan di Papua:

Pendidikan, Rencana strategis di bidang pendidikan kemungkinan akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan guru, pemerataan akses pendidikan di daerah terpencil, dan peningkatan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Program beasiswa untuk siswa unggul Papua juga menjadi perhatian penting untuk memastikan generasi muda Papua mendapatkan pendidikan yang layak.

Kesehatan, Di bidang kesehatan, fokus utama adalah peningkatan kualitas layanan kesehatan, penurunan angka stunting, dan peningkatan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Program-program kesehatan masyarakat, seperti peningkatan gizi dan sanitasi, juga menjadi bagian penting dari strategi ini.

Produktif, Rencana strategis di bidang ekonomi akan berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, UMKM, dan ekonomi kreatif. Pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas wilayah, juga menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Keamanan, Keamanan merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan di semua bidang. Rencana strategis di bidang keamanan akan mencakup penguatan harmonisasi sosial dan peningkatan kualitas aparaturnya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan investasi.

Secara keseluruhan, rencana strategis BP3OKP Papua Tengah akan berupaya untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan.

Nabire, 13/09/2025

**Anggota DPRD Papua Tengah
melakukan rapat Koordinasi kerja sama bersama Anggota DPRD Papua Tengah**



Nabire, 15/09/2025

Rapat kerja sama antara anggota Badan Pengarah Papua (BPP) Papua Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Tengah membahas berbagai aspek pembangunan dan pengelolaan dana otonomi khusus di Papua Tengah. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program-program otonomi khusus agar memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat



ANGGOTA BPP, POKJA PAPUA CERDAS, POKJA PAPUA SEHAT, POKJA PAPUA PRODUKTIF DAN POLHUKAM

Pernyusunan materi Rapat bersama MRP dan DPRP Papua tengah. (anggota BPP dan 4 kelompok kerja BPP di bantu tim administrative) terdapat 3 aspek yang menjadi bahan acuan rapat yaitu:



Nabire, 08/09/2025.

- Untuk mengawal pelaksanaan otsus dari berbagai aspek dalam upaya percepatan pembangunan di papua tengah sesuai tugas, fungsi dan peran masing-masing badan.
- Untuk mendiskusikan hasil evaluasi pelaksanaan otsus tahun anggaran 2024 sesuai tugas, fungsi dan peran dari masing-masing badan.
- Untuk menyelaraskan konsep atau prosedur pelaksanaan otsus yang berasal dari dana otsus di provinsi dan 8 kabupaten se-tanah papua

Penyampaian dukungan visi misi Anggota BPP dan Kelompok kerja BPP.



Kami Mendukung, Keberlanjutan Transformasi, Kolaborasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Papua, Melalui Penguatan Kelembagaan Bp3okp, Dalam Mewujudkan Misi Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif Dan Papua Damai, Bagi Masyarakat Papua

Nabire, 13/09/2025.

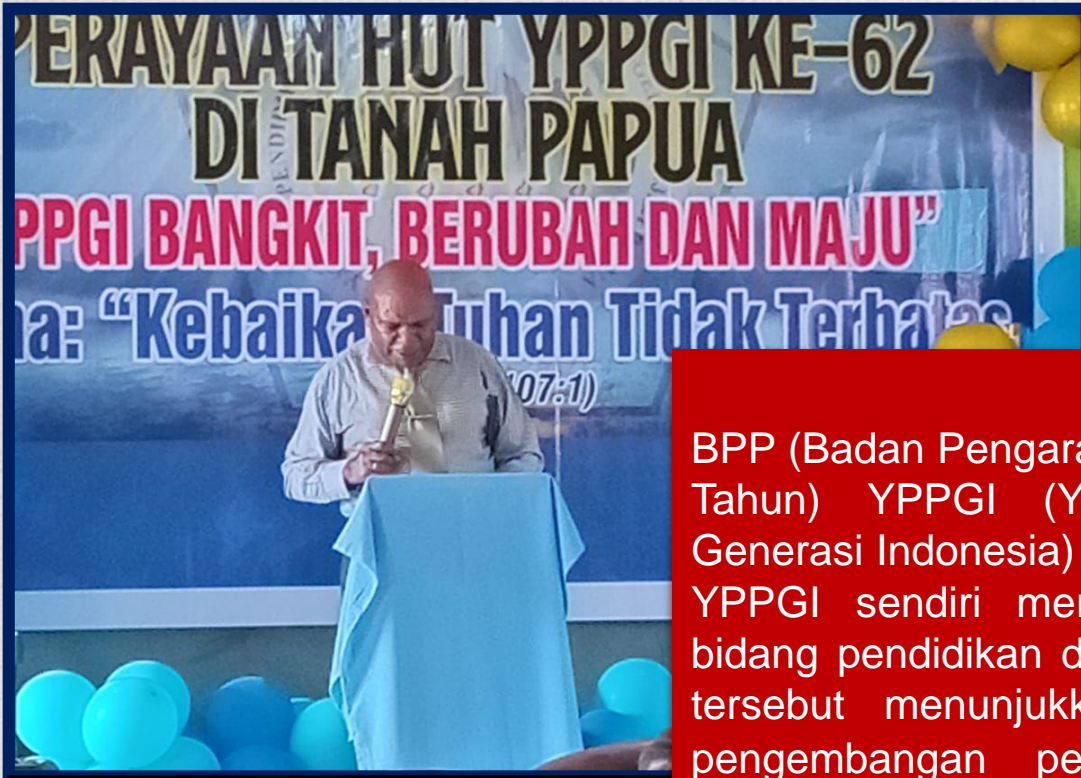
Menghadiri undangan rapat bersama DPR, membahas tentang tambang rakyat

Tambang Rakyat di Papua Tengah

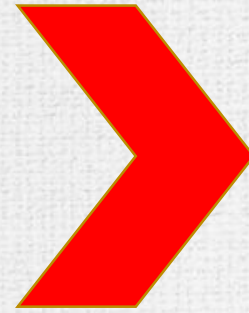
- Kegiatan pertambangan tanpa ijin ramai terjadi di Papua Tengah, seperti di Nabire, Mimika di Wakia, Pronggo dan pada areal freeport, hal ini telah menjadi perhatian pemerintah provinsi papua tengah.
- Bila belum ada penetapan WPR dan belum memperoleh IPR maka itu Penambangan Tanpa Ijin.
- Fakta lain adalah ada juga penambangan batuan yang dulu disebut galian C kini menjadi kewenangan Gubernur, bila alatnya sederhana maka bias kategori pertambangan rakyat, bila menggunakan alat berat maka ini adalah Surat Ijin Penambangan Batuan.
- Terdapat keinginan masyarakat asli papua untuk menambang pertambangan rakyat.
- Untuk itu diperlukan langkah untuk melegalkan penambangan rakyat
- Sesuai kewenangan Pemprov dan DPRPT berkomitmen sesuai dengan kewenangannya akan memberikan IPR kepada Pemilik Tambang
- Naskah Akademik dan Raperdasi Papua tengah tentang Pertambangan Rakyat sedang disiapkan oleh Tim STIH Mimika.

Nabire, 19/09/2025.





Nabire, 19/09/2025



BPP (Badan Pengarah Papua) menghadiri HUT (Hari Ulang Tahun) YPPGI (Yayasan Pengembangan Pendidikan Generasi Indonesia) di Papua Tengah yang ke-62 tahun. YPPGI sendiri merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan di Papua. Kehadiran BPP dalam acara tersebut menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pengembangan pendidikan di Papua Tengah. BPP berperan dalam mengkoordinasikan dan menyinkronkan program-program pendidikan yang dijalankan oleh berbagai pihak, termasuk sekolah-sekolah yayasan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program tersebut selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan kebutuhan lokal di Papua.

Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Produktif Dan Polhukam

Survei Puskemas pembantu rawawudo nabire barat



Survei Puskemas pembantu rawawudo nabire barat



Pembangunan Pagar sentra IKM MAKIMI NIFASI nabire timur



Survei embangunan rehab penjemuran serabut kepala MAKIMI nifasi nabire timur



survei pembangunan rumah khusus siriwini nabire kota



Survei pengembangan fasilitas kesehatan kab. Nabire



Kelompok kerja BPP melakukan Survei ke lokasi-lokasi pembangunan yang menggunakan anggaran otonomi khusus mulai tanggal 15-19 September 2025 dan mendapat beberapa kesimpulan yang menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi sebagai berikut:

- Dalam penyusunan perencanaan (Musrenbang sus) perlu keterlibatan badan-badan khusus dan masyarakat agar pemanfaatan Dana Otsus dapat tepat sasaran
- Dalam penyusunan penggunaan dana Otsus agar pedomani Pepres No. 24/2023 tentang RIPPP dan RAPPP agar tidak terjadi penyaluran yang salah sehingga masyarakat dapat merasakan
- Dalam pembuatan laporan penggunaan dana otsus agar di tembuskan ke BPP seperti yang diatur dalam PMK No 33 tahun 2024.
- Perlu adanya koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan dana otsus oleh badan-badan pengawasan otsus.
- Penggunaan dana otsus disarankan agar diutamakan untuk pelayanan OAP di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi jangan infranstruktur yang diutamakan.
- Perlu perhatikan penggunaan dana otsus untuk kebutuhan/kepentingan OAP.

Audiensi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Pj. Gubernur Provinsi Papua, Agus Fatoni, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung; Plt. Sekretaris Wapres, Al Muktabar, Kepala Sekretariat BPP Koordinator sekaligus Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Izharul Haq, serta Kepala Sekretariat BPP Manokwari sekaligus Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, Moch. Abdul Kobir. Turut hadir pula anggota BPP dari tiap provinsi, yakni Albert Yoku (Papua), Irene Manibuy (Papua Barat), Pietrus Waine (Papua Tengah), Hantor Matuan (Papua Pegunungan), Yoseph Yanowo Yolmen (Papua Selatan), dan Otto Ihilauw (Papua Barat Daya).

Audiensi Wakil Presiden RI Bersama Badan Pengarah Papua



Fokus pembahasan audiensi diarahkan pada kinerja BPP dalam menyusun program kerja dan mengawal pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus), khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam arahannya, Wapres menekankan pentingnya kerja keras dan komitmen seluruh pihak untuk membangun Papua melalui empat Kelompok Kerja utama, yaitu *Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Polhukam*.



Wapres juga menyoroti sejumlah tantangan mendesak, di antaranya rendahnya angka harapan hidup, tingginya kasus stunting, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia dan rata-rata lama sekolah, serta tingginya angka kemiskinan di wilayah terpencil seperti Mamberamo Raya akibat keterbatasan akses. Menurutnya, Papua tidak boleh dipandang sebagai daerah pinggiran, melainkan bagian integral dari NKRI yang harus menjadi prioritas pembangunan nasional. Di penghujung pertemuan, Wapres RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran BPP atas dedikasi dan kontribusi nyata dalam mendukung percepatan pembangunan Papua.

Anggota BPP

Pembahasan Rapat Mengenai Upaya Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Tengah

Rapat pembahasan mengenai upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua Tengah oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah, membahas mengenai pendekatan pemerintah kepada orang asli Papua agar dapat terlibat dan berpartisipasi langsung dalam berbagai kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, khususnya dalam mengawal proses pembangunan keempat daerah otonom baru di Papua

01



02

Tujuan Utama

Keterlibatan Masyarakat Asli Papua: Pemerintah berupaya melibatkan orang asli Papua dalam berbagai kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan. **Pengawasan Pembangunan Daerah Otonom Baru:** Mengawal proses pembangunan di Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya. **Sinergi Program:** Mensinergikan dan mengkonsolidasikan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, serta kementerian dan lembaga terkait

Rapat ini fokus pada sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di wilayah Papua. BP3OKP memiliki misi besar dalam pembangunan di Papua yang mencakup Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, serta Papua Adil dan Damai

03



Anggota kelompok kerja papua produktif Menghadiri Rapat kegiatan MBG di aula Sekda provinsi mewakili kelompok kerja Papua Sehat. Nabire, 26/09/2025



Rapat mengenai Program Makan Bergizi (MBG) di Papua Tengah membahas berbagai aspek penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Program ini bertujuan memberikan akses makanan bergizi kepada anak-anak untuk mendukung pertumbuhan dan kecerdasan mereka.

Tujuan dan Manfaat Program MBG

Program MBG bukan hanya bantuan sosial, tetapi juga langkah nyata untuk memastikan setiap anak mendapatkan makanan bergizi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anak-anak Papua dengan memberikan mereka kehidupan yang lebih sehat dan masa depan yang lebih baik.

Tantangan dan Solusi Pasokan Bahan Pangan

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pasokan bahan pangan dari wilayah setempat. Beberapa bahan pangan seperti kol, sawi, wortel, dan pepaya masih harus didatangkan dari luar daerah. Untuk mengatasi hal ini, pelaku ekonomi kreatif dan petani OAP menyatakan kesiapannya untuk mendukung program dengan menyediakan bahan pangan yang dibutuhkan secara rutin.



Kegiatan Pokja Papua produktif dan Polhukam 29 September 2025 mengikuti sosialisasi BPJS dan Diskusi bersama DPRK, DPRP dengan tema bisakah percepatan pembangunan papua tengah di tengah konflik



Soliasilasi BPJS secara daring



Nabire, 29/09/2025



Pendekatan Keamanan, Dialog dan Peningkatan Keamanan:

1



Pembangunan Ekonomi yang Pemberdayaan Lokal, Infrastruktur
Ekonomi Inklusif
Ekonomi

2



Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan kesehatan

3

tata Kelola Pemerintahan yang Baik

• **Transparansi dan Akuntabilitas:**

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
- Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.

• **Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN):**

- Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada ASN di Papua untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
- Meningkatkan rekrutmen ASN dari kalangan masyarakat Papua.

5. Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal

• **Pengakuan dan Penghargaan:**

- Mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat adat.
- Melestarikan budaya dan kearifan lokal Papua.
- Mendukung pengembangan seni dan budaya Papua.

6. Koordinasi dan Sinergi

• **Keterpaduan Program:**

- Memastikan koordinasi dan sinergi antara berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait.
- Membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini secara komprehensif dan terpadu, diharapkan percepatan pembangunan di Papua Tengah dapat tercapai, sekaligus mengurangi konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sekian dan Terimakasih